

Apa kabar?

Pengadilan Fiskal Düsseldorf harus memutuskan klasifikasi pajak atas pendapatan dari penyewaan dan penjualan peti kemas sebagai bagian dari investasi. Dalam kasus yang disengketakan, otoritas pajak secara keliru tidak mengklasifikasikan penyewaan dan penjualan peti kemas yang dimaksudkan oleh penggugat sebagai komersial.

Pengadilan Fiskal Federal sekali lagi memutuskan tentang distribusi keuntungan tersembunyi (vGA). Oleh karena itu, dalam kasus direktur pelaksana pemegang saham tunggal, mungkin terdapat bukti prima facie atas penggunaan pribadi mobil yang disediakan oleh GmbH meskipun larangan penggunaan pribadi telah disepakati dalam kontrak kerja.

Mengenai kerahasiaan pajak, dapat dibenarkan untuk tidak membuktikan kecurigaan dalam surat perintah penggeledahan dalam masalah pajak pidana. Kerahasiaan pajak melarang pengungkapan data pribadi kepada pihak ketiga yang telah diketahui dalam proses pajak pidana. Hal ini diputuskan oleh Pengadilan Regional Nuremberg-Fürth.

Pengurangan tarif pajak sebesar 7% untuk makanan restoran hingga akhir tahun tidak akan diperpanjang. Tarif pajak akan kembali menjadi 19% setelah pergantian tahun. Menurut Deutsche Presse-Agentur, hal ini telah disetujui oleh pemerintah koalisi.

Apakah Anda memiliki pertanyaan mengenai artikel dalam edisi Informasi Bulanan kali ini atau topik lainnya? Jangan ragu untuk menghubungi kami.

Kami akan dengan senang hati memberi tahu Anda.

Untuk pembayar pajak penghasilan

Kualifikasi pendapatan dari penyewaan dan penjualan peti kemas sebagai bagian dari investasi

Dalam kasus yang disengketakan, otoritas pajak secara keliru tidak mengklasifikasikan penyewaan dan penjualan peti kemas yang dimaksudkan oleh penggugat sebagai komersial. Kegiatan yang dimaksudkan oleh penggugat dalam bentuk pembelian, penjualan, dan penyewaan peti kemas melebihi ruang lingkup manajemen aset pribadi dan memenuhi persyaratan perusahaan komersial.

Pengadilan Fiskal Düsseldorf menunjukkan bahwa Pengadilan Fiskal Federal mengasumsikan keadaan khusus seperti itu, yang menyebabkan manajemen aset pribadi terlampaui, jika aktivitas penyewaan digabungkan dengan pembelian dan penjualan aset bergerak berdasarkan konsep bisnis yang seragam untuk membentuk aktivitas yang seragam. Hal ini pada gilirannya mensyaratkan bahwa penyewaan aset bergerak (jangka pendek) dan penjualannya sangat bergantung sehingga penjualan tersebut diperlukan untuk menghasilkan keuntungan sama sekali. Konsep bisnis harus ditujukan untuk memastikan bahwa total keuntungan yang diinginkan hanya dapat dicapai dengan menghasilkan pendapatan dari penjualan aset yang disewakan. Apakah persyaratan ini terpenuhi tergantung pada penilaian terhadap keadaan masing-masing kasus.

Pembagian keuntungan tersembunyi untuk direktur utama pemegang saham tunggal meskipun ada larangan penggunaan mobil perusahaan secara pribadi

Dalam kasus direktur pelaksana pemegang saham tunggal, mungkin ada bukti prima facie tentang penggunaan pribadi mobil yang disediakan oleh GmbH yang mengarah pada distribusi keuntungan tersembunyi (vGA) meskipun larangan penggunaan pribadi telah disepakati dalam kontrak kerja. Namun, distribusi keuntungan tersembunyi tidak akan dinilai di tingkat perusahaan menurut aturan 1%, tetapi menurut prinsip-prinsip kewajaran. Hal ini diputuskan oleh Pengadilan Fiskal Münster.

Menurut hukum kasus Pengadilan Fiskal Federal, pengalaman hidup secara umum menunjukkan bahwa

kendaraan perusahaan yang diberikan kepada direktur utama oleh perusahaan untuk penggunaan pribadi juga akan digunakan secara pribadi. Hal ini juga berlaku dalam kasus larangan penggunaan pribadi jika tidak ada tindakan organisasi yang diambil untuk mengecualikan penggunaan pribadi. Bukti prima facie ini didukung oleh fakta bahwa larangan penggunaan pribadi tidak memiliki konsekuensi di bawah hukum perusahaan atau hukum ketenagakerjaan karena tidak adanya konflik kepentingan. Oleh karena itu, tidak dapat diasumsikan tanpa basa-basi bahwa direktur utama mematuhi larangan tersebut. Penggugat tidak membantah bukti prima facie. Ia telah gagal memberikan bukti, misalnya dengan menyimpan buku catatan atau catatan lainnya. Penggugat tidak menyerahkan bukti apapun mengenai pelaksanaan perjanjian yang sebenarnya, yang menyatakan bahwa kendaraan perusahaan harus diparkir di lokasi perusahaan setelah jam kerja. Karena penggunaan pribadi yang diasumsikan berdasarkan bukti prima facie tidak didasarkan pada perjanjian pengalihan, maka hal ini tidak mengarah pada upah, tetapi pada pembagian keuntungan yang tersembunyi.

Namun, bertentangan dengan pendapat kantor pajak, hal ini tidak boleh dinilai dengan menggunakan aturan 1%, karena nilai ini menurut undang-undang pajak upah tidak berlaku untuk penilaian distribusi laba tersembunyi. Sebaliknya, nilai tersebut harus diestimasi sesuai dengan standar kewajaran. Dalam perhitungannya, pengadilan menerapkan markup keuntungan sebesar 5% untuk biaya kendaraan dan menetapkan penggunaan pribadi sebesar 50%. Pengadilan juga menolak tunjangan penyusutan khusus untuk kendaraan yang baru diperoleh karena tidak digunakan setidaknya 90% untuk tujuan bisnis. Penggugat tidak memberikan kendaraan tersebut kepada direktur utamanya untuk tujuan bisnis sebagai bagian dari kontrak kerja, melainkan sebagai bagian dari pembagian keuntungan yang tersembunyi. Hal ini bukan merupakan penggunaan bisnis dalam arti Bagian 7g EStG.

Bunga pengembalian dana yang dibayarkan sebagai pendapatan negatif dari aset modal

Jika bunga atas pengembalian pajak penghasilan dinilai dan dibayarkan kepada wajib pajak dan wajib pajak membayar bunga ini ke kantor pajak karena adanya penilaian bunga yang baru, hal ini dapat menyebabkan pendapatan negatif dari aset modal. Hal ini diputuskan oleh Pengadilan Fiskal Federal.

Agar penghasilan negatif dapat muncul, bunga yang



harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan bunga yang baru harus berkaitan dengan selisih yang sama dan periode bunga yang sama dengan bunga pengembalian yang diterima berdasarkan ketentuan bunga sebelumnya.

Untuk pembayar PPN

Pesta Natal sebagai jebakan pajak PPN

Acara perusahaan, seperti pesta Natal yang akan datang, sebagian besar dikodifikasikan untuk tujuan pajak penghasilan. Sayangnya, hal ini tidak berlaku untuk PPN, karena tidak ada standar hukum yang spesifik. Menurut Bagian 3 (9a) no. 2 UStG, penyediaan layanan lain secara gratis oleh pengusaha untuk penggunaan pribadi stafnya, kecuali untuk hadiah, merupakan layanan yang setara dengan layanan lain dengan pembayaran, yang dikenakan pajak di Jerman.

Namun, tunjangan yang sebagian besar disebabkan oleh kepentingan bisnis pemberi kerja tidak dikenakan pajak. Otoritas pajak berpendapat bahwa tunjangan dalam lingkup "biasa" hingga jumlah EUR 110 termasuk PPN per karyawan dan acara perusahaan dapat diasumsikan hingga dua acara perusahaan per tahun.

Dalam keputusannya pada 10.05.2023, BFH melakukan jumlah EUR 110 sebagai batas pembebasan dari perspektif PPN. Konsekuensinya adalah: Jika pengusaha sudah berniat untuk menggunakan layanan yang dibeli secara eksklusif dan langsung untuk transfer nilai gratis dalam arti Bagian 3 paragraf. 9a UStG saat membeli layanan, mereka tidak berhak untuk memotong pajak masukan.

Selanjutnya, pengusaha harus membayar PPN atas jasa lain yang setara dalam arti Bagian 3 (9a) UStG, meskipun tidak ada pengurangan pajak masukan.

Catatan

Pemerintah Jerman berencana untuk meningkatkan tunjangan bebas pajak dari 110 euro menjadi 150 euro.

Pengurangan PPN impor sebagai pajak masukan

Impor mengharuskan barang yang diimpor untuk digunakan oleh perusahaan untuk keperluan omset pengusaha yang dikenakan pajak. Hal ini mengandaikan bahwa ia menggunakan barang itu sendiri dan dengan demikian nilainya untuk transaksi-transaksi ini. Jika pengusaha hanya menyediakan jasa

pengurusan pabean atau transportasi sehubungan dengan barang impor, maka ia tidak berhak untuk memotong PPN impor.

Dengan demikian, Pengadilan Fiskal Federal mengukuhkan keputusan Pengadilan Fiskal Hamburg. Pengusaha kena pajak yang menyerahkan pemberitahuan pabean sebagai perwakilan tidak langsung dan yang kegiatannya sehubungan dengan impor barang terbatas pada mengurus formalitas pabean hanya dapat mengurangi PPN impor yang dibayarkannya sebagai PPN masukan jika terbukti ada hubungan langsung dan langsung dengan transaksi keluaran tertentu atau dengan keseluruhan kegiatan ekonomi pengusaha kena pajak. Setiap hubungan dengan kegiatan ekonomi secara keseluruhan dalam hal apapun digantikan oleh hubungan PPN impor dengan omset output tertentu dari pemasok asing.

Untuk pembayar pajak warisan

Cakupan pembebasan pajak warisan untuk rumah keluarga

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 paragraf. 1 no. 4c dari Undang-Undang Pajak Warisan (ErbStG), pengalihan properti yang ditempati pemilik (disebut rumah keluarga) dibebaskan dari pajak warisan. Pengadilan Pajak Lower Saxony memutuskan ruang lingkup pembebasan pajak bahwa hanya luas lantai bidang tanah yang dibangun dengan rumah keluarga (atau, dalam kasus bidang tanah yang lebih besar, area aksesori yang sesuai) yang dibebaskan dari pajak warisan sesuai dengan Pasal 13 (1) No. 4c ErbStG.

Penggugat memperoleh enam bidang tanah melalui warisan. Lima dari bidang-bidang tanah tersebut digabungkan sebagai satu properti dalam daftar tanah (§ 890 BGB). Dalam kasus yang disengketakan, terdapat keanehan bahwa kantor pajak yang bertanggung jawab atas penilaian telah menggabungkan tiga dari lima bidang tanah yang digabungkan dalam daftar tanah dalam satu penilaian dan menentukan nilai total untuk mereka. Dalam catatan penjelasan pada surat ketetapan pajak, kantor pajak yang menilai menyatakan bahwa pembebasan pajak untuk rumah keluarga tersebut seharusnya hanya diberikan untuk satu bidang tanah dimana rumah tersebut berada.

Hal ini juga merupakan pandangan dari kantor pajak yang bertanggung jawab atas pajak warisan. Kantor pajak tersebut tidak memasukkan nilai total yang ditentukan untuk ketiga bidang tanah tersebut dalam ketetapan pajak warisan dan memberikan

pembebasan pajak untuk hal tersebut, melainkan mengurangi nilai bidang tanah yang memiliki rumah keluarga tunggal dari nilai total dan hanya memberikan pembebasan pajak untuk nilai tersebut. Penggugat, di sisi lain, mengajukan pembebasan pajak untuk ketiga bidang tanah tersebut.

Pengadilan Pajak Lower Saxony berpendapat bahwa kantor pajak warisan hanya membebaskan sebidang tanah yang dibangun di atas rumah keluarga tersebut dari pajak. Masih harus dilihat posisi apa yang akan diambil oleh Pengadilan Fiskal Federal dalam masalah ini.

Catatan

Untuk tujuan pajak warisan, properti dinilai oleh kantor pajak di distrik mana properti yang bersangkutan berada. Kantor pajak yang bertanggung jawab atas pajak warisan kemudian mengadopsi nilai yang ditentukan dengan cara ini sebagai "penilaian dasar" dalam penilaian pajak warisan. Pada gilirannya, kantor pajak yang bertanggung jawab atas pajak warisan memutuskan pembebasan pajak untuk rumah keluarga.

Hukum acara

Tidak ada perubahan sesuai dengan Bagian 173a AO jika terjadi kesalahan impor data ke dalam portal ELSTER

Jika Anda melakukan kesalahan saat mengimpor data pajak ke portal ELSTER, ini bukan merupakan kesalahan klerikal yang dapat diperbaiki karena adanya fakta baru sesuai dengan Pasal 173a Kode Fiskal Jerman (AO).

Para wajib pajak menyiapkan sendiri SPT mereka dengan menyerahkannya kepada otoritas pajak melalui portal "Formulir ELSTER". Mereka melaporkan pendapatan dari pekerjaan, aset modal, dan persewaan. Setelah menerima data, kantor pajak (FA) menginformasikan kepada wajib pajak bahwa salinan kertas dengan tanda tangan masih harus diserahkan untuk transfer data yang dipilih ini (yang disebut prosedur terkompresi) untuk catatan data yang ditransfer. Hal ini kemudian dilakukan, dan kemudian FA melakukan penilaian sesuai dengan aplikasi dan menilai pajak penghasilan untuk tahun yang disengketakan dalam pemberitahuan tertanggal 23.10.2019. Pada tanggal 25.10.2019, para wajib pajak menyerahkan SPT lain untuk tahun yang sama yang disengketakan, sekarang menggunakan apa yang

disebut prosedur yang diautentikasi ("MY ELSTER"). Wajib pajak melakukan kesalahan dalam transfer data. Alih-alih data pernyataan yang relevan untuk tahun penilaian, data dari tahun sebelumnya secara keliru dimasukkan ke dalam formulir. FA tidak menyadari kesalahan para penuntut. Ini menafsirkan transmisi data baru sebagai SPT yang dikoreksi untuk tahun yang disengketakan dan mengeluarkan penilaian yang diubah pada 13.11.2019 sesuai dengan Bagian 172 paragraf. 1 ayat 1 no. 2 AO dengan instruksi amandemen yang sesuai. Perselisihan tidak dapat dihindari, karena pajak penghasilan yang "baru" dinilai lebih tinggi. Pada bulan Mei 2020, wajib pajak - sekarang penggugat - mengajukan permohonan agar ketentuan pajak penghasilan yang telah diubah tersebut dicabut.

FA menolak permohonan tersebut dan merujuk pada fakta bahwa keputusan tersebut telah menjadi final untuk sementara waktu. Banding tersebut tidak berhasil. Pengadilan pajak menolak tindakan tersebut. Ketentuan pajak penghasilan yang telah diubah tidak dapat dicabut karena kurangnya ketentuan koreksi yang relevan.

Pengadilan Fiskal Federal menemukan bahwa sumber kesalahan - mengeksport data SPT yang salah ke portal "MY ELSTER" - adalah tanggung jawab penggugat. Kelalaian ini tidak dapat dinilai sesuai dengan Bagian 129 AO karena kurangnya kejelasan.

Catatan

Ketika menyiapkan pengembalian pajak Anda sendiri dengan transfer data melalui ELSTER, diperlukan kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi.

Lain-lain

Kemungkinan untuk mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan kantor pajak

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan terhadap (hampir) semua pemberitahuan kantor pajak jika mereka merasa diperlakukan tidak adil, yaitu tidak sesuai dengan hukum. Di awal piramida keberatan adalah keberatan, yang persyaratannya diatur dalam Kode Fiskal Jerman (AO).

Keberatan dapat diajukan terhadap surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat paksa dari kantor pajak dan harus dikirim ke kantor pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak, atau

surat paksa tersebut. Pengajuan keberatan dapat dilakukan secara tertulis atau secara elektronik. Dalam kasus-kasus khusus, hal ini juga dapat dilakukan secara langsung di kantor pajak "untuk dicatat" di depan seorang pejabat. Namun, pesan teks saja tidak cukup. Tidak ada formulir yang ditentukan untuk mengajukan keberatan, tetapi surat atau email harus menyebutkan keputusan atau penilaian mana yang menjadi keberatan orang yang bersangkutan. Nama yang salah, seperti keberatan atau keluhan, tidak berbahaya. Namun, perlu diperhatikan bahwa temuan-temuan dalam surat ketetapan khusus, misalnya pendapatan beberapa orang dalam satu surat ketetapan, masih dapat diajukan keberatan ke kantor pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak penghasilan berikutnya, tetapi hanya dalam tenggat waktu yang berlaku untuk surat ketetapan tersebut. Jangka waktu ini umumnya satu bulan, dihitung dari tanggal penerimaan surat ketetapan pajak. Hari ini diasumsikan sebagai hari ke-3 setelah tanggal surat ketetapan pajak.

Nama orang yang mengajukan keberatan harus dicantumkan dalam surat; tanda tangan tidak diwajibkan. Keberatan tidak harus dibuat oleh konsultan pajak, pengacara, atau anggota profesi lainnya; siapa pun yang berkepentingan dapat melakukannya sendiri. Pengajuan keberatan tidak dipungut biaya di kantor pajak. Jika ada keberatan yang efektif, kantor pajak yang bertanggung jawab harus meninjau seluruh penilaian dan khususnya keberatan yang diajukan. Ini berarti bahwa kesalahan lain dalam penilaian yang belum diketahui atau ditolak oleh wajib pajak juga dapat diperbaiki. Jika hal ini mengakibatkan pajak yang lebih tinggi, kantor pajak harus menunjukkan hal ini kepada wajib pajak sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mencabut keberatan mereka. Kemudian semuanya tetap seperti semula. Setelah memeriksa keberatan, otoritas harus mengubah penilaian jika mereka menerima keberatan atau mengeluarkan keputusan yang beralasan yang menolak keberatan.

Mengajukan keberatan tidak berarti bahwa pajak yang ditaksir tidak harus dibayar. Permohonan penangguhan pelaksanaan diperlukan untuk hal ini. Otoritas harus memenuhi permohonan ini jika ada keraguan serius tentang kebenaran ketetapan pajak atau jika pembayaran akan mengakibatkan kesulitan yang tidak semestinya. Jika wajib pajak tidak setuju dengan keputusan keberatan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Hal yang sama berlaku jika keputusan atas keberatan belum dibuat dalam waktu enam bulan tanpa alasan yang kuat, dalam hal ini dapat diajukan "gugatan atas kelalaian".

Kerahasiaan pajak: Data pribadi yang diungkapkan dalam proses pajak pidana tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga

Pengadilan Regional Nuremberg-Fürth menganggap sah menurut hukum bahwa, terkait kerahasiaan pajak, surat perintah penggeledahan harus dijustifikasi secara lebih singkat atau tidak sama sekali dengan menyatakan tuduhan. Dari sudut pandang opsi perlindungan hukum pihak ketiga, hal ini juga tampaknya layak dilakukan karena pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses pidana perpajakan pada umumnya tidak dapat menentang pembuktian kecurigaan terhadap terdakwa. Menurut kerahasiaan pajak, data pribadi orang lain yang telah diketahui dalam proses pajak atau pidana pajak tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin.

Pengurangan PPN di sektor katering berakhir pada 31.12.2023

Pengurangan pajak sebesar 7% untuk makanan restoran hingga akhir tahun tidak akan diperpanjang. Tarif pajak akan kembali menjadi 19% setelah pergantian tahun. Menurut Deutsche Presse-Agentur, hal ini telah disetujui oleh pemerintah koalisi.

Modernisasi hukum kemitraan (MoPeG) mulai berlaku pada tanggal 01.01.2024

Undang-undang tentang Modernisasi Hukum Kemitraan (MoPeG) berlaku pada tanggal 01.01.2024. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memodernisasi hukum kemitraan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan ekonomi saat ini. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan untuk kemitraan, untuk kemitraan hukum perdata (GbR). Perubahan utama adalah kapasitas hukum GbR, pengenalan daftar perusahaan dan kemungkinan transformasi sesuai dengan Undang-Undang Transformasi. Undang-undang ini juga mencakup perubahan undang-undang perpajakan, seperti opsi bagi kemitraan untuk memilih pajak perusahaan dan keringanan pajak untuk kemitraan yang lebih kecil. Oleh karena itu, pengusaha dan perusahaan harus membiasakan diri dengan perubahan tersebut dan mengambil tindakan yang tepat.

Undang-Undang Peluang Pertumbuhan disahkan

Undang-Undang Peluang Pertumbuhan disahkan oleh Bundestag pada tanggal 17.11.2023. Pemerintah Jerman ingin menggunakannya untuk memperkuat daya saing Jerman.

Tanggal pajak/jaminan sosial Desember 2023/Januari 2024

Jenis pajak	Kedewasaan	
Pajak upah, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas	11.12.2023 ¹	10.01.2024 ²
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas	11.12.2023	Tidak berlaku
Pajak perusahaan, biaya tambahan solidaritas	11.12.2023	Tidak berlaku
Pajak pertambahan nilai	11.12.2023 ³	10.01.2024 ⁴
Berakhirnya masa tenggang untuk jenis pajak di atas jika pembayaran dilakukan oleh:	Transfer bank ⁵	15.01.2024
	Periksa ⁶	10.01.2024
Asuransi sosial ⁷	27.12.2023	29.01.2024
Pajak keuntungan modal, biaya tambahan solidaritas	Pajak capital gain dan biaya tambahan solidaritas yang harus dibayarkan harus dibayarkan ke kantor pajak terkait pada saat yang sama dengan distribusi laba kepada pemegang saham.	

- Selama sebulan terakhir.
- Untuk bulan terakhir, untuk pembayar triwulanan untuk triwulan kalender sebelumnya, untuk pembayar tahunan untuk tahun kalender sebelumnya.
- Untuk bulan sebelumnya, untuk bulan sebelumnya dalam kasus perpanjangan permanen.
- Untuk bulan terakhir, untuk bulan sebelumnya dalam hal perpanjangan permanen, dan untuk kuartal kalender terakhir dalam hal pembayar triwulanan tanpa perpanjangan permanen.
- SPT PPN dan SPT PPh masa depan umumnya harus diserahkan (secara elektronik) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka hari kerja berikutnya adalah tenggat waktunya. Tidak ada biaya keterlambatan pembayaran yang akan dikenakan jika pembayaran terlambat hingga tiga hari. Transfer bank harus dilakukan tepat waktu sehingga tanggal nilai pada rekening kantor pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- Jika pembayaran dilakukan dengan cek, harap diperhatikan bahwa pembayaran tidak dianggap telah dilakukan hingga tiga hari setelah cek diterima oleh kantor pajak. Otorisasi pendebitan langsung harus diterbitkan sebagai gantinya.
- Juran jaminan sosial jatuh tempo pada hari kerja bank ketiga terakhir pada bulan berjalan. Prosedur debit langsung disarankan untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran. Semua dana asuransi kesehatan memiliki tenggat waktu standar untuk mengirimkan laporan kontribusi. Laporan tersebut harus diterima oleh agen penagihan masing-masing selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo (yaitu pada tanggal 21.12.2023/25.01.2024, pukul 00.00 dalam setiap kasus). Keunikan regional mengenai tanggal jatuh tempo mungkin perlu dipertimbangkan. Jika akuntansi penggajian dilakukan oleh kontraktor eksternal, data upah dan gaji harus dikirim ke kontraktor sekitar sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini berlaku jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Senin atau pada hari setelah hari libur nasional.

Jejak

Konten telah disiapkan dengan sangat hati-hati, tidak mengklaim sebagai sesuatu yang lengkap dan tidak dapat menggantikan pemeriksaan dan saran dalam kasus-kasus individual. Artikel dan ilustrasi **yang** terdapat di dalamnya dilindungi oleh hak cipta.